



FAKTOR STRUKTURAL DAN KULTURAL PENYEBAB KESENJANGAN SOSIAL: KASUS INDUSTRI BATIK PAMEKASAN MADURA

Oki Rahadianto Sutopo✉

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

Article History

Received : June 2012
Accepted : August 2013
Published : Sept 2013

Keywords

batik; culture; inequality;
structure; social reproduction

Abstrak

Secara teoretis, pembangunan ekonomi diandaikan akan menghasilkan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pasca ditetapkan sebagai sentra batik, yang terjadi di Kecamatan Proppo Pamekasan Madura justru sebaliknya, tingkat prasejahtera warga berdasarkan alasan ekonomi justru tertinggi di antara kecamatan yang lain. Dengan menggunakan metode kualitatif secara spesifik dengan teknik wawancara mendalam dan observasi, sebagai studi awal analisis dalam artikel ini akan menjelaskan mengenai faktor struktural, kultural serta proses reproduksi sosial yang menyebabkan kesenjangan sosial tersebut. Reproduksi struktur sosial yang timpang menyebabkan distribusi kuasa juga tidak merata, menciptakan relasi dominasi subordinasi dan pada prosesnya akses juga tidak merata. Struktur sosial yang timpang ini diperkuat dengan kultur patriarkhis yang semakin meneguhkan kesenjangan sosial.

STRUCTURAL AND CULTURAL FACTORS OF SOCIAL GAP: CASE OF BATIK INDUSTRY IN PAMEKASAN MADURA

Abstract

Theoretically, economic development will create equality of wealth distribution to the people. This is not the case in Proppo disctrict Pamekasan Madura after being declared as one of Batik centre, Proppo has the highest rate of disadvantaged people compared with other districts. Using qualitative method, specifically in-depth interview and observation, this article explains the structural, cultural factors as well as the process of social reproduction that resulted on social inequality in Proppo district. This article concludes that the reproduction of unequal social structure resulted on unequal power distribution, dominant-subordinant relation and also the inequality in terms of access. This unequal social structure also supported by patriarchal culture that resulted on strengthen social inequality.

© 2013 Universitas Negeri Semarang

✉ Corresponding author :
Address: Jalan SosioYustisia Bulaksumur Yogyakarta Indonesia 55281
E-mail address: oki.rahadianto@ugm.ac.id

ISSN 2086-5465

PENDAHULUAN

Batik sebagai salah satu produk budaya lokal telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu bagian dari kekayaan budaya dunia. Hal ini merupakan manifestasi dari akomodasi budaya-budaya lokal menjadi bagian dari budaya global, dampaknya kemudian tidak hanya pada penguatan identitas sebuah bangsa maupun daerah sebagai pemproduksi batik namun dari sisi yang lain berpotensi untuk dikonversi dalam *economic capital* (Bourdieu and Wacquant 1992), meningkatkan devisa negara, meningkatkan pendapatan daerah serta berpotensi menyerap tenaga kerja potensial.

Pamekasan Madura sebagai salah satu daerah penghasil batik secara turun temurun di Indonesia merespon pengakuan UNESCO tersebut dengan mencanangkan diri sebagai kota batik sejak tahun 2009. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu informan, *booming* batik yang terjadi pada 2009 kemudian membuat permintaan terhadap batik Pamekasan meningkat. Salah satu kecamatan di Pamekasan Madura yang mempunyai tradisi sebagai penghasil batik yaitu Proppo terkena dampak dari trend positif tersebut sejak dinobatkan sebagai sentra industri batik. Sumbangsih Proppo terlihat misalnya dalam mensuplai industri batik di Kabupaten Bangkalan, 90% batik Bangkalan berasal dari Kecamatan Proppo (Wawancara dengan MM; September 2012). Pemerintah daerah Pamekasan turut memfasilitasi trend tersebut antara lain dengan penyediaan Pasar Batik, pembangunan Pasar 17 Agustus dan promosi batik melalui pameran kebudayaan dan pameran industri (Aini 2010).

Secara teoritis, pengembangan perekonomian dalam suatu daerah akan memberikan keuntungan secara ekonomi pada mayoritas warganya, namun yang terjadi di Kecamatan Proppo justru sebaliknya. Berdasarkan data Pamekasan dalam angka 2011 ditunjukkan bahwa Kecamatan Proppo selain termasuk dalam lima besar kecamatan terpadat juga termasuk salah satu kecamatan dengan jumlah keluarga prasejahtera terbanyak menurut alasan ekonomi. Kenyataan objektif/*sui generis facts* (Durkheim

dalam Seidman, 2007) ini menarik untuk dicermati serta ditelaah lebih dalam karena disisi yang lain Kecamatan Proppo merupakan salah satu daerah sentra industri batik yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan sejak tahun 2009. Apabila menggunakan asumsi *trickle down effect* (Rostow dalam Sutopo, 2012) maka sentra industri batik diprediksikan mampu meningkatkan kesejahteraan warga Kecamatan Proppo atau dengan kata lain kue pembangunan akan menetes ke bawah. Namun kenyataan objektif justru setelah tiga tahun berjalan tingkat kesejahteraan warga tidak banyak mengalami perubahan. Hal inilah yang menjadi rumusan masalah serta pertanyaan dalam penelitian ini, jika Kecamatan Proppo adalah sentra industri batik lalu mengapa warga yang masuk dalam golongan prasejahtera berdasarkan alasan ekonomi justru menempati posisi tertinggi? Apa saja faktor struktural serta kultural yang menyebabkan kesenjangan sosial tersebut? Artikel ini merupakan studi awal untuk menjawab kedua masalah tersebut. *Level of analysis* dalam penelitian ini sebagaimana imperatif dari Ritzer dalam Sutopo (2012) merupakan perpaduan antara makro-mikro, kerangka ini berguna untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai fenomena sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta observasi. Informan dalam penelitian diperoleh secara *purposive*, peneliti menggunakan jaringan sosial yang telah dibangun sebelumnya dengan pihak Disperindag serta Bappeda Pamekasan Madura, salah satu staf Bappeda menjadi pemandu selama penelitian berlangsung. Secara spesifik, lokasi penelitian terfokus pada Desa Klampar Kecamatan Proppo sebagai representasi dari pusat industri kecil dan menengah batik, di Desa Klampar semua pelaku industri batik dari pengusaha industri rumahan, distributor hingga buruh batik terdapat di satu desa yang sama dan interaksi berlangsung secara intens. Informan dalam penelitian

merepresentasikan perwakilan dari pemerintah daerah (Bappeda), pengusaha, distributor serta buruh batik di Desa Klampar Kecamatan Proppo. Wawancara mendalam dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan alat bantu perekam serta dilengkapi dengan catatan lapangan. Wawancara mendalam berlangsung dengan durasi antara 1-2 jam, dengan lokasi serta waktu ditentukan berdasarkan kesepakatan antara peneliti dengan informan. Berdasarkan ketersediaan waktu, wawancara pertama dilakukan dengan perwakilan Bappeda kemudian dengan distributor batik dan selanjutnya wawancara dilakukan dengan pengusaha dan buruh batik. Observasi dilakukan di sentra industri batik di Desa Klampar Kecamatan Proppo sedangkan data sekunder diperoleh dari Pamekasan dalam angka 2011. Proses penelitian dalam artikel ini dilakukan pada bulan September 2012.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura dengan luas wilayah 79.230 ha. Jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan pada 2009 sebesar 851.690 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.075 jiwa per km, secara geografis batas-batas kabupaten pamekasan antara lain: sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa, selatan dengan selat Madura, sebelah barat dengan Kabupaten Sampang sedangkan bagian timur dengan Kabupaten Sumenep. Mayoritas penggunaan tanah sebagai lahan tegalan, pertanian dan perumahan penduduk. Hal ini berimplikasi pada sektor usaha ekonomi penduduk pamekasan dimana mayoritas masih menggantungkan pada sektor pertanian, hal ini berbeda misalnya dengan Kabupaten Sumenep yang lebih mengandalkan sektor kelautan sebagai sumber ekonomi. Di Pamekasan, sumbangan sektor pertanian mencapai 55,89% dibandingkan sektor tersier (36,63%) dan sekunder (7,48%).

Secara demografis, menurut data Pamekasan dalam angka 2011 jumlah penduduk terbanyak menurut umur adalah usia 10-14 tahun, 15-19 tahun dan 25-29 tahun. Ketiga golongan usia tersebut merupakan

kelompok usia produktif, kondisi ini dapat menjadi sumber daya manusia yang berharga untuk membangun Kabupaten Pamekasan. Namun jika ditelaah lebih dalam, tingkat pendidikan tertinggi adalah lulusan sekolah dasar (SD), tidak sekolah dan lulusan SMP. Dalam kenyataannya golongan tersebut relatif lebih mudah mendapatkan pekerjaan namun hanya sebatas sebagai buruh, hal ini terkait dengan keberadaan sektor industri mayoritas di Pamekasan yang didominasi oleh industri kecil (mempekerjakan 5-19 pekerja) dan industri menengah (mempekerjakan 20-99 pekerja), sedangkan menurut data Pamekasan dalam angka 2011 pencari kerja terbanyak justru pemuda terdidik lulusan Sarjana (S1), SLTA dan D3.

Dibandingkan dengan kabupaten di Pulau Madura yang lain, Kabupaten Pamekasan tergolong salah satu daerah tertinggal dan miskin. Sebagaimana dijelaskan dalam profil investasi produk unggulan Kabupaten Pamekasan (2011) terdapat 27,48% penduduk yang masih tergolong miskin. Kabupaten pamekasan terdiri dari 13 kecamatan antara lain: Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan, Pamekasan, Proppo, Palengaan, Pegantenan, Kadur, Pakong, Waru, Batumarmar dan Pasean. Setiap kecamatan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, di bawah ini dijelaskan mengenai tingkat kepadatan perkecamatan:

Dari ketiga belas kecamatan di Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Proppo sebagai lokasi dalam penelitian ini menempati posisi kelima dengan penduduk terpadat setelah Kecamatan Pamekasan, Palengaan, Batumarmar dan Pademawu. Sedangkan apabila dilihat dari tingkat kesejahteraan penduduk berdasarkan alasan ekonomi, maka dapat dijelaskan di bawah ini:

Dari ketiga belas kecamatan di Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Proppo menempati urutan pertama sebagai daerah yang tergolong dalam kategori prasejahtera menurut alasan ekonomi, di atas Kecamatan Waru dan Tlanakan yang menempati posisi kedua dan ketiga.

Studi sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan industri batik di Desa Klampar yang dila-

Tabel 1. Penduduk Perkecamatan Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio 2010

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tlanakan	28.875	30.281	59.156
Pademawu	37.281	39.432	76.713
Galis	13.696	14.539	28.235
Larangan	25.379	27.795	53.174
Pamekasan	43.707	45.396	89.103
Proppo	36.490	38.589	75.079
Palengaan	43.633	41.613	85.246
Pegantenan	29.803	33.211	63.014
Kadur	21.263	23.359	44.622
Pakong	16.096	18.333	34.429
Waru	28.698	30.648	59.346
Batumarmar	38.232	39.421	77.653
Pasean	23.798	26.350	50.148

Sumber: Pamekasan dalam angka (2011)

Tabel 2. Jumlah Keluarga Prasejahtera Perkecamatan Menurut Kategori Alasan Ekonomi 2010

Kecamatan	Keluarga	Persen (%)
Tlanakan	6.592	9.01
Pademawu	3.707	5.07
Galis	3.157	4.32
Larangan	3.852	5.27
Pamekasan	4.929	6.74
Proppo	13.993	19.13
Palengaan	5.021	6.86
Pegantenan	6.771	9.26
Kadur	2.918	3.99
Pakong	2.477	3.39
Waru	9.979	13.64
Batumarmar	3.354	4.59
Pasean	6.395	8.74

Sumber: Pamekasan dalam angka (2011)

kukan oleh Aini (2010) cenderung hanya melihat dari sudut pandang ekonomi, hasil analisa yang dimunculkan cenderung mengabaikan aspek struktur sosial serta kultur masyarakat di Desa klampar. Hal ini berakibat pada penjelasan yang cenderung bersifat *blame the victims* dan tidak peka pada kesenjangan sosial, struktur sosial yang ti-

dak seimbang serta kultur sebagai faktor penyebab kesenjangan. Berbeda dengan pendekatan ekonomi, disiplin sosiologi lebih melihat faktor sosial serta budaya dalam menjelaskan suatu fenomena. Dalam artikel ini pendekatan yang diusulkan oleh Wirutomo (2011) mengenai dialektika antara struktur, kultur dan proses menjadi *tool of*

analysis untuk memahami mengapa tingkat pra sejahtera warga di Desa Klampar tergolong paling tinggi di Pamekasan Madura meskipun ditetapkan sebagai sentra batik.

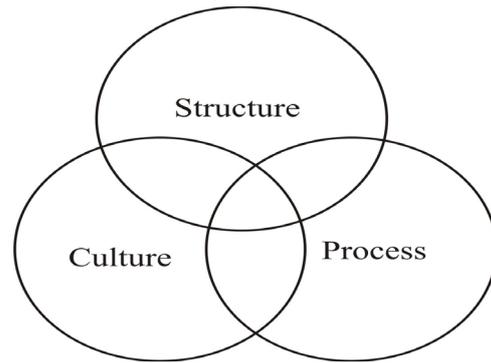
Dalam menjelaskan fenomena sosial, Wirutomo mengusulkan pentingnya memperhatikan faktor struktur sosial, lebih lanjut struktur sosial menurut Wirutomo (2011:96) adalah:

Social structure is pattern of relation (particularly power relation) between social groups that implies coercive, imperative and constraining power of the dominant towards the powerless actors. It builds structural domination.

Selain memperhitungkan aspek struktur sosial, aspek kultur juga penting untuk memahami fenomena sosial, lebih lanjut kultur menurut Wirutomo (2011: 97) adalah:

Culture is a system of values, norms, beliefs and customs as well as traditions, internalized by individuals or society, thereby has the power to form a pattern of behavior and attitude of the member of society. The existing culture is not always the best way of living that give well being to the people. There are various powerful groups trying to conserve the existing culture to protect their interest and oppress other groups through cultural hegemony.

Baik struktur sosial maupun kultur saling berinteraksi secara dialektik, aspek tersebut diproduksi maupun direproduksi oleh aktor-aktor sosial melalui apa yang dinamakan sebagai proses sosial (*social process*), dalam kenyataannya aspek struktur, kultur maupun proses ini tidak secara *rigid* terpisah satu sama lain namun justru saling tumpang tindih, sebagaimana dijelaskan: *In the real life, structure, culture and social process are not separated, at some degree they crosscut each other* (Wirutomo 2011; 97). Di bawah ini dijelaskan skema keterkaitan antara struktur, kultur dan proses dalam menjelaskan fenomena sosial:



Gambar 1. Dialektika Antara Struktur, Kultur dan Proses (Wirutomo 2011)

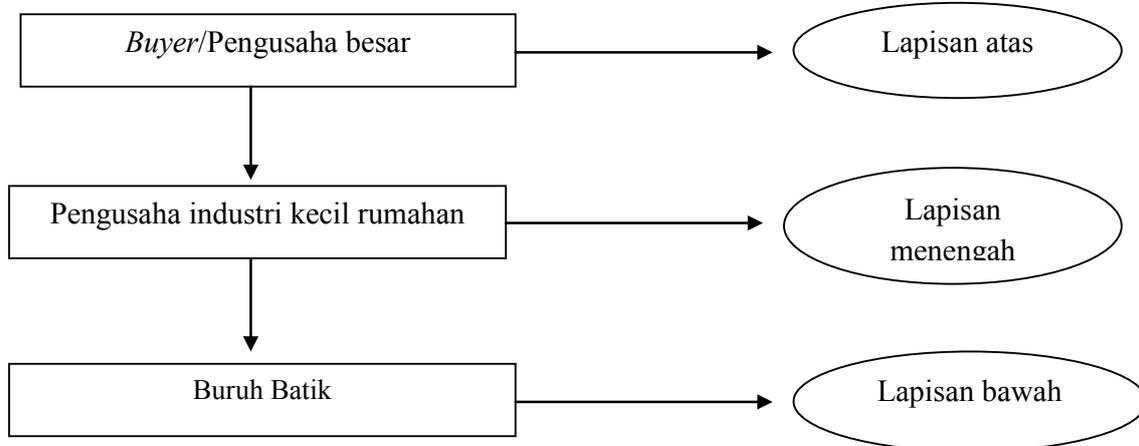
Dinamika sosial Desa Klampar Kecamatan Proppo Pamekasan Madura semakin aktif semenjak dicanangkannya Pamekasan sebagai kota batik pada tahun 2009. Pekerjaan sebagai pembatik telah berlangsung secara turun temurun dilakukan oleh warga Desa Klampar, sebelum *booming* batik sebagai salah satu sektor industri kreatif mayoritas warga menjalani dua macam pekerjaan yang berbeda. Saat musim tanam dan panen, warga bekerja sebagai petani tembakau kemudian di sela-sela musim kering mereka menjalankan usaha sampingan sebagai pengrajin batik. Pasca dicanangkannya Desa Klampar sebagai salah satu pusat sentra batik di Pamekasan, mayoritas warga beralih bekerja di industri batik. Sebagaimana dijelaskan oleh M, salah satu tokoh masyarakat di Desa Klampar yang juga menjalankan bisnis batik:

Mayoritas penduduk di Desa Klampar Kecamatan Proppo bekerja di industri batik. Hingga sekarang terdapat sekitar 12 sentra batik. hal ini terutama terjadi semenjak peresmian Pamekasan sebagai kota batik tahun 2009, lalu kemudian penduduk berbondong-bondong berpindah mata pencaharian.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan olahan hasil wawancara, perubahan pekerjaan tersebut mayoritas didominasi sebagai buruh dan pedagang batik kecil (industri rumahan). Sedangkan pedagang atau pengusaha besar hanya minoritas namun

mempunyai kekuasaan (Weber dalam Ritzer 2010) yang kuat untuk mengatur jalannya transaksi ekonomi. Struktur hierarki

pekerjaan berdasarkan sektor batik di Desa Klampar Kecamatan Proppo apabila dibuat skema adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Hierarki Dalam Industri Batik Desa Klampar Kecamatan Proppo Pamekasan Madura Sumber: Olahan hasil wawancara serta observasi peneliti (2012)

Hierarki pekerjaan dalam industri batik mengisyaratkan relasi yang bersifat tidak seimbang atau dengan kata lain struktur yang tereproduksi berdasarkan dominasi-subordinasi, tidak semata-mata pembagian kerja (*division of labours*) sebagaimana dijelaskan Durkheim dalam Ritzer (2007). *Buyer/pengusaha besar* mempunyai kuasa yang lebih besar dalam mengontrol transaksi ekonomi batik maupun menciptakan *feel of the game* (Bourdieu and Wacquant 1992) dibandingkan pengusaha industri kecil rumahan maupun buruh. Dengan kata lain pengusaha besar menempati posisi *elite* dalam struktur tersebut, kekuasaan para elit sebagaimana dijelaskan oleh Mills:

The power elite is composed of men whose positions enable them to transcend the ordinary environments of ordinary people; they are in positions to make decisions having major consequences (Mills 1956; 3)

Dalam struktur hierarki tersebut, buruh batik menempati posisi terendah serta mempunyai daya tawar paling lemah, sedangkan pengusaha kecil rumahan berada di posisi dominan jika berhadapan dengan buruh namun masih di bawah kontrol bu-

yer/pengusaha besar.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti di salah satu *showroom* pengusaha besar milik Pak MH di Desa Klampar menunjukkan bahwa sistem jual beli telah dibuat secara modern misalnya setiap batik yang dijual telah dipasang *barcode*, proses pembayaran melalui kasir berseragam serta dilengkapi komputer, ruangan *showroom* dilengkapi *air conditioner* (AC), selain itu juga disediakan air minum gratis bagi pembeli. Batik yang dijual di *showroom* tersebut juga bervariasi dari kualitas rendah, menengah hingga atas. Sebagai pengusaha yang menempati posisi teratas dalam struktur, kekuasaan Pak M tidak hanya dalam hal mempekerjakan pembatik dalam jumlah banyak, menentukan upah para pembatik, menerima titipan dari pedagang yang lain sekaligus menentukan harga jual serta sebagai *supplier* untuk perdagangan batik di luar kota Madura, antara lain Surabaya, Yogyakarta dan Jakarta.

Berbeda dengan pengusaha besar, pengusaha industri kecil rumahan yang berada dalam lapisan menengah tidak mempekerjakan sebanyak pengusaha besar, mereka biasanya mengerjakan batik pesanan dari pengusaha besar. Selain itu mereka juga menjual batik yang dihasilkan ke pengusaha besar, jarang di antara mereka mampu mengirim pesanan barang ke luar kota. Daya

tawar dalam penentuan harga batik lemah di hadapan pengusaha besar. Seringkali kurangnya modal ekonomi membuat mereka meminta pinjaman dari pengusaha besar. Berdasarkan observasi peneliti, *showroom* pengusaha industri rumahan ini hanya dipergunakan sebagai tempat memproduksi batik.

Dalam struktur terendah, buruh batik yang terdiri dari pembatik, pemotong kain, pewarna batik hampir tidak mempunyai kekuasaan sama sekali dihadapkan dengan kedua struktur di atasnya. Lamanya waktu bekerja tidak sesuai dengan upah yang me-

reka dapatkan, selain itu peneliti juga tidak menemui mengenai jaminan kesejahteraan bagi buruh batik, misalnya mekanisme cuti hamil, tunjangan sakit dan tunjangan yang lain. Penyediaan jaminan kesejahteraan lebih berdasarkan mekanisme kultural dan berdasarkan “kebaikan hati” pihak yang mempekerjakan. Mayoritas buruh batik di sentra industri ini adalah perempuan dengan lulusan SD dan SMP. Di bawah ini dijelaskan skema relasi dominasi subordinasi serta otoritas yang tidak seimbang antara pengusaha dengan buruh batik:

Tabel 3. Relasi Dominasi antara Pengusaha dan Buruh dalam Industri Batik Desa Klampar Kecamatan Proppo Pamekasan Madura

Aktor Sosial	Relasi antaraktor Sosial	Kekuasaan
Buyer/Pengusaha besar	Dominan terhadap kedua aktor sosial yang lain (+)	Mempekerjakan buruh dalam jumlah banyak Menentukan upah buruh Menentukan harga jual batik dari industri rumahan Menjadi <i>supplier</i> batik untuk luar kota
Pengusaha industri kecil rumahan	Subordinat terhadap pengusaha besar (-)	Mempekerjakan buruh dalam jumlah sedang
Buruh Batik	Dominan terhadap buruh batik (+) Subordinat terhadap kedua aktor sosial yang lain (-) (-)	Sebagai ruang produksi batik Tidak mempunyai kekuasaan

Relasi dominasi di Desa Klampar tidak terlepas dari struktur sosial yang telah kuat mengakar sebelumnya dalam *life world* (Berger dan Luckman, 1966) masyarakat Madura, dengan kata lain yang terjadi adalah proses reproduksi sosial sebagaimana dijelaskan Bourdieu dan Wacquant (1992). Meskipun *mode of production* di Desa Klampar mengalami perubahan namun dinamika sosial tersebut dibangun berdasarkan struktur sosial yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini sebagaimana penelitian Saputro (2008) dan Zamroni (2012) mengenai *elite* lokal Madura pascareformasi yaitu kombinasi antara tiga *elite* yang mendapatkan posisi

tertinggi dalam masyarakat Madura antara lain: para *klebun*, *juragan* dan kyai. *Klebun* (kepala desa) merupakan orang yang dianggap masyarakat paling bertanggung jawab terhadap pembangunan desa, merupakan penghubung antara desa dengan penguasa yang lebih tinggi di tingkat Kabupaten maupun pusat. *Juragan* merupakan *elite* ekonomi lokal yang identik dengan kekayaan yang melimpah, biasanya disebut sebagai *orang sughi* (orang kaya), sedangkan kyai adalah pemuka agama kharismatik yang mempunyai kemampuan lebih dalam hal spiritual dibandingkan warga biasa (Weber dalam Ritzer, 2010). Dalam hal ini kyai dianggap

mempunyai sifat *tawadu* (sikap rendah hati terhadap sesama) dan *wara* (tidak mengagungkan kehidupan dunia). Peran kyai ini bahkan telah berlangsung jauh pada masa kolonial dan orde baru, sebagaimana dijelaskan oleh Noor:

Kyai terbagi menjadi dua tipe yaitu kyai major serta kyai minor. Kyai major mempunyai akses politik maupun sosial yang lebih kepada pemerintah pusat namun di lain pihak juga mempunyai "kaki" yang tidak kalah kuat dalam tataran grassroots. Sedangkan tipe yang lain adalah kyai minor, mereka lebih banyak bersinggungan dengan grassroots terutama terkait dengan aspek pendidikan, dengan kata lain mereka menjadi cultural producer namun tidak memiliki akses yang kuat dengan pemerintah pusat (Noor, 1992).

Reproduksi sosial yang terjadi di Desa Klampar pasca dicanangkan sebagai sentra batik tidak terlepas dari struktur yang telah ada sebelumnya (*existing social structure*). Para pengusaha besar serta pengusaha industri rumahan merupakan aktor sosial yang dalam struktur sebelumnya menempati posisi tinggi dalam masyarakat. Berdasarkan observasi dan wawancara, pengusaha besar pemilik *showroom* tergolong dalam lapisan *elite*, selain *track record* orangtuanya yang adalah kyai, juga posisi sang pemilik tersebut sebagai *juragan* sekaligus menyandang gelar haji. Pengusaha besar ini juga telah menjalin relasi yang erat dengan *klebun* sebagai pemimpin administratif sehingga memiliki akses yang leluasa dengan pihak pemerintah terutama Disperindagkop dan Bappeda. Pengusaha besar tersebut merupakan representasi dari *elite* lokal Desa Klampar yang mengombinasikan antara kapital budaya, kapital ekonomi serta kapital sosial (Bourdieu dan Wacquant, 1992).

Struktur sosial sebelumnya yang sudah dalam kondisi timpang menyebabkan *boom* batik serta dijadikannya Desa Klampar sebagai sentra batik tidak mendatangkan kesejahteraan yang merata bagi mayoritas warganya, yang terjadi justru reproduksi

sosial mengakibatkan *elite* yang sudah ada mendapatkan akses berlebih baik dari pemerintah daerah maupun aktor yang lain guna kemudian memanfaatkan momentum tersebut untuk meraih kekayaan yang sebesar-besarnya sekaligus mereproduksi posisi dominan dalam ranah (Swartz, 1997). Dari dua belas sentra batik di Desa Klampar mayoritas dimiliki oleh *elite* lokal yang merepresentasikan posisi sosial sebagai *klebun*, *juragan*, kyai ataupun mereka yang memiliki kedekatan dengan ketiga *elite* tersebut. Sedangkan mayoritas warga Desa Klampar yang berada di posisi bawah hanya dapat memanfaatkan *booming* batik tersebut sebagai buruh, dengan posisi terendah mereka hanya mendapatkan keuntungan yang minimal dibandingkan dengan *elite* lokal yang menjelma menjadi pengusaha besar maupun pengusaha industri rumahan. Dengan kata lain, yang terjadi adalah kesenjangan sosial bukan tetesan ke bawah/*trickle down effect* sebagaimana diprediksikan oleh para pembuat kebijakan ekonomi, faktor struktural ini menjadi salah satu penyebab mengapa warga tingkat prasejahtera berdasarkan alasan ekonomi di Kecamatan Proppo menempati posisi tertinggi di antara Kecamatan yang lain di Pamekasan Madura.

Selain faktor struktural, peneliti melihat bahwa faktor kultural masyarakat juga menjadi penyebab kesenjangan sosial di Kecamatan Proppo. Sebagaimana dijelaskan Wirutomo (2011) kultur sebagai nilai yang terinternalisasi dalam batin masyarakat dan menjadi pedoman berperilaku tidak selalu memberikan keuntungan bagi individu, justru kultur seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang berkuasa sebagai sarana kontrol. Penjelasan ini senada dengan pendapat Bourdieu (1998) yang melihat bahwa kultur sebagai sumber dominasi yang dilestarikan melalui reproduksi *doxa* dan *orthodoxa*. Saat kultur menjadi *doxa* maka kemudian masyarakat menerima secara *taken for granted* dan bahkan dianggap sebagai kebenaran yang mutlak, hal ini kemudian menentukan pula habitus serta *feel of the game* dalam suatu ranah sosial sebagaimana dijelaskan Bourdieu (1998).

Struktur sosial yang telah eksis sebe-

lumnya (*existing social structure*) terkait erat dengan kultur dominan yang direproduksi dalam masyarakat. Dalam kasus Desa Klampar Kecamatan Proppo, kultur masyarakat yang cenderung patriarkhis, bias gender dan menempatkan perempuan di bawah laki-laki membuat kesenjangan sosial terus berlanjut. Sebagaimana dijelaskan salah satu tokoh masyarakat Pak MM:

Pandangan hidup masyarakat disini masih menganggap bahwa perempuan cukup hanya sampai tingkat SD atau SMP, setelah itu mereka lebih baik kemudian dinikahkan dan menjadi ibu rumah tangga ataupun membantu usaha ekonomi sang laki-laki. (Wawancara dengan Pak MM; September 2012)

Mayoritas buruh batik di Desa Klampar Kecamatan Proppo adalah perempuan, mereka menjadi buruh batik jahit, tulis hingga pewarnaan. Perempuan yang bekerja sebagai buruh mayoritas adalah ibu rumah tangga, namun juga ada sebagian kecil yang merupakan generasi muda yang tidak dapat melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Kultur masyarakat yang patriarkhis sebagaimana dijelaskan di atas membuat para buruh batik yang mayoritas perempuan tidak berkualifikasi tinggi dalam hal pendidikan, termasuk dalam keahlian khusus membatik. Di Pamekasan terdapat SMK yang memfokuskan kepada teknik pengolahan batik namun kultur yang ada menghambat mereka untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Kurangnya pendidikan membuat kemampuan mereka dalam mengolah kain batik menjadi sangat terbatas, sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Asosiasi Pedagang Batik Desa Klampar:

Kurangnya pelatihan membuat mayoritas dari mereka hanya bisa menerima order dalam hal pewarnaan, sedangkan penulisan motif batik dikerjakan di tempat lain. Selain itu kurangnya pelatihan juga mengakibatkan mereka kesulitan untuk mengaplikasikan teknologi modern, mereka lebih terbiasa dengan teknologi tradisional (Wawancara dengan Ketua Asosiasi

Pedagang Batik Desa Klampar; September 2012).

Selain dalam hal teknis, kultur masyarakat yang membatasi perempuan hanya menempuh jenjang pendidikan hingga tingkat SD/SMP ikut berdampak pada proses reproduksi struktur sosial dimana dalam hal pekerjaan peluang terbesar perempuan hanya menjadi buruh batik, kesempatan perempuan untuk menjadi pengusaha besar atau pengusaha industri rumahan hampir mustahil dalam masyarakat dengan struktur dan kultur yang timpang. Rendahnya kualifikasi pendidikan pada perempuan juga berarti mereka kekurangan modal budaya/*cultural capital* yang berfungsi untuk dikonversikan menjadi modal ekonomi (Bourdieu dan Wacquant, 1992), atau dengan kata lain *lack of education* ini kemudian mengakibatkan upah yang mereka terima tergolong rendah karena posisi mereka yang hanya sebagai buruh batik. Dalam tradisi marxian, reproduksi sosial melalui budaya yang mengakibatkan perempuan hanya menjadi buruh membuat pengusaha besar maupun pengusaha industri rumahan sebagai pemilik alat produksi mendapatkan keuntungan dari nilai lebih (*surplus value*) yaitu selisih antara tenaga yang dikeluarkan dengan upah (Mills, 1962) yang didapat buruh perempuan. Dalam proses konstruksi realitas sosial, hal ini juga menjadi penyebab mengapa warga prasejahtera di Kecamatan Proppo masih tergolong tinggi di antara Kecamatan yang lain di Pamekasan.

SIMPULAN

Pembangunan ekonomi di suatu daerah tidak selalu membawa dampak positif yang merata pada semua warganya. Kasus yang terjadi di Desa Klampar Kecamatan Proppo pasca ditetapkan sebagai industri batik justru menunjukkan kecenderungan meningkatnya kesenjangan sosial. Hal ini disebabkan karena faktor struktural, kultural serta proses sosial yang cenderung mereproduksi kesenjangan sosial. Transformasi menjadi sentra batik mampu memunculkan hierarki baru (pengusaha besar, pengusaha industri rumahan, buruh batik) namun

kontruksi tersebut merupakan reproduksi struktur sosial yang telah eksis sebelumnya yaitu perpaduan antara *klebun*, *juragan* dan kyai. Struktur yang timpang membuat kemudahan akses untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga juga timpang, yang terjadi justru *elite* lama menjadi semakin kaya sedangkan mayoritas warga tetap dalam golongan prasejahtera. Selain faktor struktural, kultur yang dominan terutama bias patriarkhis dan menempatkan perempuan di bawah laki-laki membuat proses reproduksi kesenjangan sosial juga semakin menajam. Kultur yang dominan membuat perempuan tidak dapat mengakses pendidikan yang lebih tinggi sehingga peluang mereka untuk menduduki struktur yang lebih tinggi juga tertutup, reproduksi sosial peran perempuan hanya sebatas sebagai buruh batik. Dalam prosesnya hal ini semakin membuat pengusaha besar maupun industri rumahan yang memiliki alat produksi mendapatkan keuntungan melalui akumulasi *surplus value* dari buruh batik perempuan. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor struktural, kultural serta proses reproduksi sosial menyebabkan kesenjangan sosial dan tingkat prasejahtera warga Desa Klampar Kecamatan Proppo menduduki posisi tertinggi meskipun telah dicanangkan sebagai sentra industri batik di Pamekasan Madura.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. 2010. Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Industri Batik Madura di Pamekasan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Malang.
- Berger, P.I and Thomas L. 1966. *The Social Construction of Reality*. USA: Basic Books.
- Bourdieu and Wacquant. 1992. *Invitation to Reflexive Sociology*. England: Polity
- Bourdieu, P. 1998. *Outline of Theory of Practice*. England: Cambridge.
- Mansurnoor, L. 1992. Local Initiatives and Government Plans in Madura. *Journal of Southeast Asian Issues*. 7 (1): 69-94.
- Mills, C.W. 1956. *The Power Elite*. USA: Oxford.
- Mills, C. W. 1962. *The Marxist*. USA: Del publishing.
- Pamekasan dalam angka. 2011. Badan Pusat Statistik. Kabupaten Madura.
- Ritzer, G. 2007. *Modern Sociological Theory*. USA: McGrawhill.
- Ritzer, G. 2010. *Classical Sociological Theory*. USA: McGrawhill.
- Saputro, E. 2008. Kiai Langgar dan Klebun: Sebuah Studi tentang Kontestasi Makelar Budaya. *Tesis*. Pascasarjana CRCS- UGM. Yogyakarta.
- Swartz, D. 1997. *Culture and Power*. USA: Chicago Press.
- Sutopo, O.R. 2012. Relevansi Integrasi Paradigma Melalui Level Analisis dari George Ritzer Terhadap Penggunaan Mixed Methods. *Jurnal Universitas Paramadina*. 9 (1): 318-328.
- Sutopo, O.R. 2012. Biaya-Biaya Manusia dalam Era Neoliberal: Sebuah Imperatif. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. 1 (1): 30-43.
- Wirutomo, P. 2011. Social Development Policies on Informal Sector in Solo. *Bisnis dan Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. 18 (2): 94-107.
- Zamroni, I. 2012. Dinamika Elite Lokal Madura. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*. 17 (1): 23-48